

PERJANJIAN KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 2017



provinsi gorontalo



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo
Telp./Fax : (0435) 831586/831587

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN YASIN, SH, MH**
Jabatan : **KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA PROVINSI GORONTALO**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Prof.Dr.Ir.Hj. WINARNI MONOARFA, MS**
Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, Januari 2017

Pihak Kedua,

Prof.Dr.Ir.Hj. WINARNI MONOARFA, MS

Pihak Pertama,

RIDWAN YASIN, SH, MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETDA PROVINSI GORONTALO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang di susun	10 Ranperda 300 Pergub/SK
2.	Terwujudnya bantuan hukum penyelenggara pemerintahan	Lembaga Bantuan Hukum Pemerintah Daerah sebagai Pendamping dan Pelayanan Hukum bagi Masyarakat	3 kali pendampingan
3.	Tersusunnya Dokumen-dokumen kesepakatan Kerjasama.	Jumlah dokumen kesepakatan (MOU) dan dokumen kerjasama (PK)	18 Mou dan 18 PK
4.	Terlaksananya kapasitas PPNS	Jumlah aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kapasitas dan komitmen dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan	68 PPNS
5.	Terwujudnya seekertariat bersama HAM	Jumlah aparat yang senantiasa mengacu dan berorientasi pada standar HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	2 Kali Rakor
6.	Terwujudnya Penguatan Organisasi/Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi/kelembagaan	5 SKPD
7.	Terwujudnya dokumen pelayanan public	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik yang cepat dan mudah di akses	33 SOP dan 15 SPM
8.	Terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja	Jumlah Dokumen kinerja dan jumlah kapasitas SDM di bidang Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja	2 Dokumen 75 orang
9.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen evaluasi	3 Dokumen
		Persentase keselarasan program dengan dokumen perencanaan	100%
		Hasil Penilaian AKIP SKPD Oleh Inspektorat Provinsi	B
		Jumlah laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP	3 Laporan
10.	Meningkatnya pelayanan administrasi jasa perkantoran dan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kepegawaian	Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu	11
		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	7
		Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana	100%
		Persentase kelengkapan database kepegawaian yang dapat di selesaikan tepat waktu	100%
		Jumlah dokumen kepegawaian	12

Kegiatan :	Anggaran :
1. Koordinasi Bidang Hukum	Rp 50,000,000
2. Pengkajian dan Pendampingan Ranperda	Rp 147,550,000
3. Pengkajian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah	Rp 98,550,000
4. Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 375,805,000
5. Pendampingan dan Penyelesaian Masalah/Sengketa Hukum	Rp 428,520,000
6. Orientasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hukum	Rp 72,750,000
7. Pelayanan Hukum Terpadu melalui Sidang Itsbat Nika Mobile	Rp 221,940,000
8. Bimbingan Teknis Penyusunan MOU dan Perjanjian Kerjasama	Rp 39,500,000
9. Rapat Koordinasi Hak Asasi Manusia (HAM)	Rp 50,000,000
10. Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Rapat Koordinasi PPNS	Rp 73,350,000
11. Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	Rp 125,000,000
12. Validasi Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan	Rp 100,000,000
13. Evaluasi dan Penguatan Standar Operasional Prosedu	Rp 70,880,000
14. Kompetisi inovasi Pelayanan Publik	Rp 70,880,000
15. Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Rp 165,750,000
16. Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Kinerja Instansi Pemerintah	Rp 89,810,000
17. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 505,479,512
18. Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp 168,915,000
19. Pelatihan Teknis / Bimbingan Teknis	Rp 126,000,000

Gorontalo, Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH



Prof. Dr. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS

KEPALA BIRO



RIDWAN YASIN, SH, MH